

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH MITRA HARIWANG DESA PASIRLAWANG KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN CIAMIS

Tania Ayu Wandani¹, Endah Vestikowati², Neti Sunarti³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail: taniaayubanjarsari22@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik triangulasi pengumpulan dilakukan dengan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 5(lima) orang ditentukan melalui proses purposive sampling. Teknik pengolahan data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah merupakan keseriusan dan keberhasilan pemerintah daerah mengelola sampah sampai dengan tingkat lokal desa dengan adanya pengelolaan sampah oleh bank sampah. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan pelaksanaan program belum tersosialisai secara luas kepada masyarakat, kurangnya dukungan fasilitas fisik persampahan, rendahnya kemampuan staf pengelola bank sampah, koordinasi lintas sektor belum terlaksana dengan baik. Sehingga diperlukan pembinaan dan komitmen yang terorganisir dengan baik melalui komunikasi yang melembaga.

Kata Kunci: *Implementasi Program, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of waste management programs by Mitra Hariwang Waste Bank, Pasirlawang Village, Purwadadi District, Ciamis Regency. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The triangulation technique of collection is done through observation, in-depth interviews, and documentation. The number of informants as many as 5 (five) people is determined through a purposive sampling process. Data processing techniques are carried out with stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study stated that the existence of Ciamis Regency Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Waste Management is the seriousness and success of local governments in managing waste up to the local village level with waste management by waste banks. However, the reality on the ground shows that the implementation of the

program has not been widely socialized to the community, lack of support for physical waste facilities, low ability of waste bank management staff, cross-sector coordination has not been carried out properly. So it requires well-organized coaching and commitment through institutionalized communication.

Keywords: *Program Implementation, Waste Management, Waste Bank*

PENDAHULUAN

Desa sebagai bagian penting dalam pemerintahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Melalui UU inilah harapan peningkatan kualitas hidup dalam menyejahterakan masyarakat desa dapat tercapai dengan cara pelibatan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa sebagai lembaga pemerintahan terkecil dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, berkedudukan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan sendiri.

Peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan. Suatu program dalam pembangunan merupakan unsur utama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi dan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program itu sendiri sebagai unsur kedua, serta pelaksana program (pemerintah) sebagai unsur ketiga yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program dilaksanakan (Abdul, 2005-54).

Langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan adalah tahapan implementasi, dimana dalam tahapan ini

akan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi pasca program tersebut dirumuskan serta melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya program tersebut (Mazmanian dan Sebatier dalam Ulfaridha, G, 2017).

Diantara program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat ialah pengelolaan sampah. Sampah menjadi persoalan krusial mengingat belum dikelola dengan baik sedangkan jumlahnya yang terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya populasi penduduk dan konsumsi masyarakat dapat menimbulkan dampak berbahaya (Rosmita, 2022). Dampak negatif dan berbahaya yang ditimbulkan dari adanya penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan terjadinya bencana alam dan sumber penyakit (Haryanti et al, 2020). Tchobanoglous (2002) berpendapat perlunya metode pengelolaan sampah yang efektif agar dampak negatif tersebut dapat dihindarkan salah satunya melalui pendekatan terpadu dalam perencanaan desain, pengelolaan limbah/sampah yang efisien, ekonomis dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada pola penanganan sampah melalui pengurangan dan

penanganan sampah pada hakikatnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pada tataran level daerah, pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengeksplisitkannya secara jelas pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Tujuan daerah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan dengan penanganan dan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) bahwa pada periode 2018-2019 jumlah penduduk di kabupaten Ciamis sebanyak 1.401.423 jiwa menghasilkan jumlah timbulan sampah yang cukup besar yaitu 78.173 ton/hari, Jumlah sampah yang diangkut ke TPA hanya sebesar 3.327 ton/hari. Hal ini menunjukkan hanya sebesar 4% nya saja sampah yang sudah terkelola dengan baik di Kabupaten Ciamis, sedangkan sisanya sebesar 96% masih belum ditangani dengan baik.

Pengelolaan sampah saat ini sedang banyak dikembangkan di desa-desa melalui pembentukan bank sampah sebagai unit pengelola sampah di tingkat desa. Pola pengelolaan sampah melalui tahapan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah

melalui konsep tabungan sampah menjadi solusi terbaik untuk membantu kerja pemerintah dalam penanganan sampah.

Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis juga telah mengelola sampah dengan membentuk bank sampah melalui Keputusan Kepala Desa Pasirlawang Nomor 141.1/SK.13/Ds. 07/VI/2022 tentang Pembentukan Bank Sampah. Sebelum keluarnya SK tersebut, sebenarnya keberadaan bank sampah sudah berjalan setahun sebelumnya yakni tahun 2021 dengan nama Bank Sampah Mitra Hariwang. Bank sampah ini melaksanakan program pengelolaan sampah dengan beberapa tahapan. Tahap pertama ialah pengambilan dan/atau penerimaan sampah dari nasabah (masyarakat). Tahap kedua yaitu pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Dan tahap ketiga ialah penjemputan/pengambilan sampah oleh Bank Sampah Induk Ciamis. Keberadaan bank sampah ini bukan hanya mengatasi persoalan lingkungan yang diakibatkan dari timbulan sampah, namun disisi lain memberikan manfaat ekonomis karena pendapatan masyarakat meningkat. Hal tersebut tentunya sangat menarik karena masyarakat yang menabung sampah (nasabah) akan dikonversikan dalam bentuk uang yang dimasukkan dalam buku tabungan untuk kemudian dapat ditukar dengan beberapa kebutuhan seperti bensin, gas LPG, dan bisa juga untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai dengan jumlah

uang yang telah ditabungkan. Namun, ironisnya keberadaan bank sampah ini tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Desa Pasirlawang, dengan dibuktikan jumlah nasabah bank sampah Mitra Hariwang yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah keluarga di setiap dusunnya. Berikut disajikan dalam tabel 1.1 tentang jumlah nasabah Bank Sampah Mitra Hariwang Desa pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Bank Sampah
Mitra Hariwang

Dusun	Jumlah KK	Jumlah Nasabah
Pasangrahan	376	3
Mekarsari	269	11
Cakungsari	566	45
Jumlah	1211	59

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Dalam tahap pemahaman ini belum sampai pada masyarakat luas sehingga masih banyaknya sampah yang belum bisa dikelola dengan baik yang berakibatkan pada lingkungan yang tercemar, air yang meluap dari selokan yang menyebabkan banjir dikarenakan masyarakat masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Permasalahan yang timbul dalam program pengelolaan sampah adalah masih belum adanya kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah yang dapat dikelola dengan baik. Program pengelolaan sampah juga dapat menjadi solusi dari persoalan terjadinya banjir saat musim hujan. Berdasarkan dengan hal diatas,

penulis menemukan beberapa fenomena yang dijumpai yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah dari pihak Pemerintah Desa terhadap masyarakat secara luas. Hal ini terlihat dari masih banyaknya Masyarakat yang belum memahami pentingnya bank sampah sehingga jumlah nasabah sedikit.
2. Belum optimalnya sumber daya pelaksana utama program pengelolaan sampah oleh bank sampah mitra hariwang. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya staf yang mencukupi dalam melaksanakan program dan belum adanya sumber fasilitas fisik berupa tempat yang memadai untuk melaksanakan program.
3. Sikap dan pemahaman pelaksana yang masih rendah mengenai program pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dalam belum bertanggung jawabnya anggota bank sampah yang diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya karena anggota tidak diberikan insentif sama sekali dalam mengelola bank sampah. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah desa sebagai penyelenggara program yang masih belum maksimal dalam pelaksanaan program.
4. Belum terjalankan dengan baik struktur mengenai kegiatan program pelaksanaan program pengelolaan sampah oleh bank sampah mitra hariwang. Hal ini dapat dilihat dari

belum dijalankannya dengan baik jadwal pemilahan dan jadwal penjemputan sampah dikarenakan belum adanya tempat yang memadai untuk pemilahan sampah karena masih menggunakan lahan warga.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik

melakukan penelitian dengan menetapkan rumusan masalah “ Bagaimana Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis?”.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah sebuah program atau kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi menurut Usman (2002:70) mengatakan: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan”. Implementasi menurut Setiawan (2004:39) mengatakan: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. Selanjutnya implementasi menurut Harsono (2002:67) mengatakan: “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, yang bermuara pada aktivitas, aksi, serta tindakan yang melaksanakan suatu program atau kebijakan guna tercapainya suatu tujuan tertentu.

Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditunjukkan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Program adalah hal utama yang dilakukan demi terciptanya proses kegiatan. Sebuah program dikatakan berhasil atau baik apabila ada manfaatnya atau pengaruh yang positif bagi masyarakat (Pasaribu, 2021). Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Menurut Sujianto (Abdul,2008:32) program adalah suatu komplek dari

tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas, dan langkah-langkah yang harus diambil.

Kodoatie (2003:312) menyatakan bahwa “Sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan”. Menurut SK SNI T-13-1990-F, pada dasarnya sistem pengelolaan sampah perkotaan dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain.

Pada dasarnya bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung (menyerahkan sampah) juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan (Astaria & Heruman, 2016). Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke tempat bengkel kerja lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip perbankan, jadi penyeter sampah akan mendapat buku tabungan. (Suriyani, 2022).

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edwards III (Hessel 2003:12)

menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan atau program diperlukan pertimbangan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu :

1. Komunikasi

Bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi membutuhkan keakuratan dan komunikasi harus secara akurat pula diterima implementor.

2. Sumber Daya.

Merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program atau, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan.

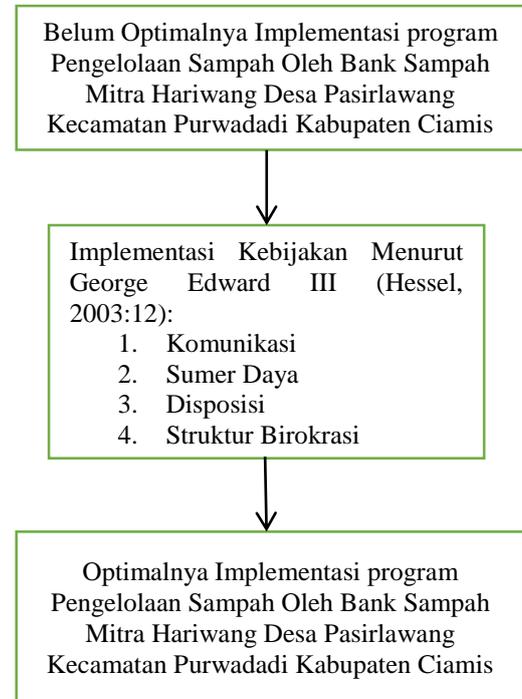
3. Sikap Disposisi.

Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun, ketika sikap atau prespektif implementor ini berbeda dengan para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan secara pasti lebih rumit.

4. Struktur Birokrasi

Dua karakter utama dari birokrasi ini adalah prosedur pengoperasian standar dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai respon-respon internal pada waktu dan sumber implementasi terbatas dan keinginan atas keseragaman dalam operasi organisasi kompleks dan organisasi yang tersebar secara luas, mereka seringkali tetap efektif disebabkan kurangnya aktivitas birokrasi. Yang kedua pada dasarnya terjadi tekanan di luar unit birokrasi sebagai komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara bagian dan *charter* kota, sifat dari kebijakan luas mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Berikut ini penulis sajikan model kerangka berpikir yang dijadikan acuan dalam penelitian ini sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kerangka Pemikiran



METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistic/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan

kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Menurut Sugiyono (2013:18), menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna, daripada generalisasi”.

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bakal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik *purposive sampling* dengan menetapkan narasumbernya adalah Kepala Desa, Pengurus Bank Sampah, perwakilan nasabah dan masyarakat non nasabah, serta Ketua BPD.

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi

sekali. Analisis ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan sejak sebelum menapaki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Pasirlawang merupakan hasil pemekaran dari Desa Purwadadi pada tahun 1983, dan dapat berjalan sebagaimana mestinya desa-desa berkembang sesuai dengan perkembangan jamannya. Dilihat dari kondisi geografis Desa Pasirlawang memiliki luas wilayah 399 Ha, yang terdiri dari 3(tiga) dusun (Dusun Pasanggrahan, Dusun Mekarsari, dan Dusun Cakungsari) dengan jumlah 25 RT.

Desa Pasirlawang secara topografi berada di bawah perbukitan dengan kondisi alam hutan dan area persawahan dan sebagian rawa yang merupakan bagian dari tanah adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 menjelaskan Bank Sampah adalah

tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Di desa Pasirlawang bank sampah sudah ada sejak tahun 2021 dengan nama Bank Sampah Mitra Hariwang. Keberadaan bank sampah bisa membantu dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan membantu perekonomian masyarakat dalam beberapa hal. Bagi nasabah yang menabung sampah uang yang diterima atau ditabungkan bisa untuk ditukar dengan beberapa kebutuhan seperti bensin, gas lpg, dan dapat untuk pembayaran PBB sesuai dengan jumlah uang yang telah ditabungkan.

Kelompok bank sampah sudah ditetapkan oleh kepala desa dengan dikeluarkannya SK pembentukan bank sampah yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLAWANG NOMOR 141.1/SK. 13/Ds. 07/VI/2022 TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH. Adapun Visi dan Misi Bank Sampah Mitra Hariwang, sebagai berikut:

A. Visi Bank Sampah Mitra Hariwang

“Menjadikan bank sampah sebagai wadah pembelajaran untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau dan berkelanjutan”

B. Misi Bank Sampah Mitra Hariwang

- 1) Mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.
- 2) Menjadikan Bank Sampah Mitra Hariwang sebagai contoh bagi bank

sampah yang telah terbentuk maupun yang akan terbentuk.

- 3) Mengembangkan manajemen pengelolaan bank sampah.

Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan program Bank Sampah Ciamis yang menjadi pusat pengelolaan sampah, yang diturunkan ketingkat pemerintahan desa dalam bentuk pengelolaan sampah ditingkat paling dasar pemerintahan. Praktek pemerintah yang terjadi dalam pengelolaan sampah berbasis implementasi. Alasan yang mendasari pengelolaan sampah sebagai wujud dari implementasi karena penanganan lingkungan melibatkan organisasi pemerintahan dan pemerintahan yang saling bekerjasama

Nasabah Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Nasabah Bank Sampah Mitra Hariwang Tahun 2021-2023

Dusun	2021	2022	2023
Pasanggrahan	22	12	3
Cakungsari	43	50	35
Mekarsari	11	8	2
Jumlah	76	70	40

Sumber: Hasil Penelitian 2023

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan suatu pelaksanaan yang telah direncanakan untuk diterapkan pada suatu sasaran dan mengacu pada peraturan yang relevan

untuk mewujudkan suatu tujuan. Proses implementasi kebijakan dapat dimulai setelah kebijakan publik sudah ditetapkan dengan mendapatkan pengesahan dari lembaga yang memiliki wewenang. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tertera dalam aturan yang dapat dipakai sebagai rujukan, yaitu SNI revisi 03-3242-1994 tentang tata cara pengelolaan sampah di permukiman. Salah satu program yang bisa dilakukan yaitu pada pengelolaan sampah karena sampah merupakan salah satu masalah actual, upaya yang dapat membantu pengurangan sampah adalah dengan didirikannya Bank Sampah di setiap desa yang diharapkan dapat membantu membersihkan lingkungan dari sampah. Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke tempat bengkel kerja lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip perbankan, jadi penyeter sampah akan mendapat buku tabungan. (Suriyani, 2014).

Terkait penelitian mengenai Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis menggunakan 4 (empat) variabel implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George Edward III (Hessel, 2003:12), yaitu:

1. Komunikasi

- a. Transmisi, adanya penyaluran informasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Salah satu dari berbagai rintangan untuk mentransmisikan implementasi kebijakan adalah penolakan implementor terhadap keputusan yang ada.
- b. Kejelasan, adanya komunikasi yang diterima atau disampaikan petunjuk mengenai implementasi tidak hanya mesti diterima harus juga jelas.
- c. Konsistensi, adanya aturan implementasi yang konsisten sebagaimana juga mengimplementasikan kebijakan sehingga adanya hasil yang efektif.

2. Sumber Daya

- a. Staf, sumber daya yang paling esensial dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf dengan memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan, karena salah satu sumber kegagalan implementasi kebijakan adalah staf yang tidak cukup.
- b. Informasi, merupakan sumber esensial kedua dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan bagaimana melakukan sebuah kebijakan yang diimplementasikan.
- c. Kewenangan, adanya kekuasaan dalam menentukan pelaksanaan implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas, berbagai fasilitas fisik yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan.

3. Sikap Disposisi
 - a. Efek disposisi, kebijakan akan diimplementasikan secara meyakinkan karena adanya perasaan kuat mengenai kebijakan dari para implementor.
 - b. Staffing birokrasi, pemilihan dan pengangkatan staf sehingga adanya kepengurusan yang jelas mengenai implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
 - a. Prosedur pengoprasian standar, menciptakan sebuah aturan atau prosedur-prosedur baru untuk setiap tahapan kerja dalam implementasi kebijakan.
 - b. Fragmentasi, adanya pembagian tanggung jawab suatu kebijakan diantara unit-unit organisasional.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disajikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator pada komunikan. Komunikasi membutuhkan keakuratan, dan secara akurat pula harus bisa diterima implementor

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dimensi komunikasi dalam Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dari 3(tiga) indicator keseluruhan masih belum

berjalan dengan baik, seperti belum adanya sosialisasi pada masyarakat luas mengenai kejelasan program sehingga belum mendapatkan hasil yang efektif.

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta aturan yang konsisten untuk hasil yang efektif. Pengetahuan atas apa yang dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan dapat berjalan dengan baik pula. sejalan dengan yang dikemukakan Winarmo (2016:156), menyatakan bahwa “Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan apa yang bisa dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan dalam peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada personalia yang tepat”.

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam impelentasi, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan. Maka dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi akan tercapai sebuah implementasi kebijakan yang

baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi masih berupa adanya masyarakat yang menganggap pengelolaan sampah tidak penting dan belum jelas sehingga belum mendapatkan hasil yang efektif. Oleh karena itu upaya yang dilakukan agar program pengelolaan sampah berjalan lancar dengan cara memberikan informasi secara langsung melalui acara-acara yang diadakan masyarakat maupun desa, upaya yang dilakukan lainnya dengan memberikan hadiah bagi nasabah yang rajin menabung seperti pemberian baskom sehingga dapat meningkatkan antusiasme dan kepercayaan masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dimensi sumber daya dalam Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis masih rendah. Dari indikator keseluruhan masih belum berjalan dengan baik seperti fasilitas yang masih pinjam tempat punya warga, pengurus yang mayoritas IRT dan

belum maksimal dalam pelaksanaan program sehingga nasabah semakin berkurang. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Pada hakikatnya, sumber daya manusia yang bekerja disuatu organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Adapun dokumentasi jenis sarana prasarana Bank Sampah Mitra Hariwang disajikan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian 2023

**Gambar 4.3 Timbangan Gantung
Milik Bank Sampah Mitra Hariwang**



Sumber: Hasil Penelitian 2023

**Gambar 4.4 Bangunan Bank
Sampah Mitra Hariwang Milik
Warga Setempat**



Sumber: Hasil Penelitian 2023
Gambar 4.5 Kendaraan Roda 3
Milik Pemerintah Desa

Dalam indikator informasi sudah berjalan dengan baik dimana informasi yang disampaikan oleh pihak bank sampah melibatkan campur tangan pihak lain agar informasi yang diberikan dapat tersebar luas dan memudahkan untuk mengetahui keberadaan program ini. Selanjutnya dalam indikator staff, kewenangan, dan fasilitas masih belum optimal. Yang mana staff pengurus bank sampah masih kurang jumlahnya serta belum memiliki pemahaman mengenai tugasnya. Kewenangan yang telah dikeluarkan dalam SK Kepala Desa tidak ada penjabaran secara terperinci mengenai tugas dan fungsi di masing-masing pengurus sehingga pengurus kurang inovatif dalam menjalankan tugasnya. Adapun bank sampah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai dalam melaksanakan program karena mayoritas fasilitas menggunakan milik warga.

Adapun upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan memaksimalkan kinerja pengurus agar setiap tugas dapat selesai dengan baik, meminta bantuan warga sekitar saat kekurangan orang. Upaya lainnya yang dilakukan pengurus

melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi sesuai dengan pemahaman mereka serta melakukan koordinasi dengan Bank Sampah Induk atau Pemerintah Desa. Upaya lainnya dalam mengatasi fasilitas yang tidak dimiliki bank sampah dengan meminjam atau menyewa bangunan dan kendaraan milik warga yang dibayar melalui keuntungan bank sampah menjual sampah ke BSC.

3. Sikap Disposisi

Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Berdasarkan hasil penelitian dimensi sikap/disposisi dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis belum berjalan. Hal ini ditunjukkan dari 2(dua) indikator masih belum berjalan seperti belum adanya insentif yang diberikan pemerintah desa pada pengurus Bank Sampah baik berupa anggaran atau gaji maupun berupa fasilitas yang dapat mendorong pengurus bekerja lebih giat dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, begitupula sebagai penghargaan untuk pengurus agar bekerja lebih giat.

Menurut Ismail (2009:136), menyatakan bahwa "Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki

oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif”.

Dalam indicator adanya keyakinan perilaku implementor dalam melaksanakan program belum berjalan dilihat dari masih belum adanya dukungan dari pemerintahan desa berupa fasilitas dan masyarakat yang masih belum meyakini bahwa program dapat berjalan dengan baik sehingga nasabah semakin berkurang. Adapun yang belum optimal dilaksanakan dalam indicator kepengurusan yang jelas dalam melaksanakan program, dimana struktur kepengurusan sudah dibentuk secara jelas namun belum adanya pemenuhan tugas yang dimiliki karena dalam SK yang dikeluarkan Kepala Desa bahwa tugas dan fungsi dalam kepengurusan bank sampah tidak dibuat, sehingga pengurus tidak mengerti akan tugas yang dimilikinya. Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan tugas sesuai dengan pemahaman pengurus serta melakukan koordinasi dengan Bank Sampah Induk atau Pemerintah Desa.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Dua karakter utama dari birokrasi ini adalah prosedur pengoprasian standar dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai respon-respon internal pada waktu dan sumber implementasi terbatas dan keinginan atas keseragaman dalam operasi organisasi kompleks dan organisasi yang tersebar secara luas, mereka seringkali tetap efektif disebabkan kurangnya aktivitas birokrasi. Yang kedua pada dasarnya terjadi tekanan di luar unit birokrasi sebagai komite legislative, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi Negara bagian dan charter kota, sifat dari kebijakan luas mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian dimensi struktur birokrasi dalam Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis belum terlaksana. Hal ini ditunjukkan dari 2(dua) indicator belum terbentuk SOP maupun pembagian tanggungjawab secara jelas.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Uraian diatas sejalan dengan pendapat Ismail (2009:136), menyatakan bahwa “Struktur birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-sungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan”.

Dalam indicator pengoprasian standar pelaksanaan program belum terbentuknya SOP pelaksanaan program. Hal ini dijelaskan hanya ada jadwal pelaksanaan program saja. Adapun pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program sudah dibagi namun dalam pelaksanaanya petugas belum sepenuhnya melakukan tanggungjawabnya karena tidak adanya penjabaran mengenai tanggungjawab pengurus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan 4(empat) variabel yang sangat menentukan implementasi kebijakan menurut George Edward III (2003) dalam Hessel yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini ditunjukan dari sebagian besar jawaban informan

masih menunjukkan lemahnya pelaksanaan program pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil observasi bahwa para pelaksana program dari berbagai sektor telah dibagi dalam pengimplementasian program pengelolaan sampah yang secara umum belum terlaksana secara optimal.

Kemudian belum adanya penyampaian informasi melalui sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kejelasan pengelolaan sampah yang berkaitan dengan peran aktif masyarakat dalam menjalankan program, sehingga informasi yang dimiliki masyarakat saat ini belum jelas, serta belum adanya aturan yang konsisten sehingga hasil yang didapatkan belum efektif. Lalu, belum adanya staf yang yang mencukupi dalam melaksanakan program yang merupakan unsur penting begitu pula belum terpenuhinya fasilitas fisik yang memadai dalam melaksanakan program. Adapun kepengurusan dan pembagian tanggung jawab dimana pengurus yang memiliki tugas tersebut belum bisa melakukan tugasnya dengan baik.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang ada seperti dilakukannya pendekatan secara bertahap kepada masyarakat sekaligus menyampaikan informasi mengenai program, adanya pemberian hadiah bagi nasabah yang rajin menabung berupa baskom sehingga masyarakat yang belum jadi nasabah termotivasi.

Memaksimalkan kinerja staf bank sampah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki, menyewa atau meminjam fasilitas yang dibutuhkan bank sampah dalam melaksanakan program kepada warga setempat yang dibayar dengan upah atau kebutuhan lain yang senilai. Adapun pelaksanaan program dilakukan dengan

disesuaikan dengan kelonggaran waktu yang dimiliki masyarakat/nasabah dan pengurus sehingga pelaksanaan program masih bisa berjalan. Adapun pelaksanaan program dilakukan dengan disesuaikan dengan kelonggaran waktu yang dimiliki masyarakat/nasabah dan pengurus sehingga pelaksanaan program masih bisa berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung. CV Alfabeta. Arikunto, Suharsimi, 2010. Manajemen Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta.
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya (Bank Sampah (Waste Banks) as an alternative of community-based waste management strategy in Tasikmalaya). *Jurnal manusia dan lingkungan*, 23(1), 136-141.
- Dewi, R. P. (2019). Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Djiwandono, A. H., Khairullah, S., Indra, & Fatimah, E. (2016). Implementasi Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, 3(3), 110–119.
- Haryanti, S., Gravitanian, E., & Wijaya, M. (2020). Studi penerapan bank sampah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi*, 6(1), 60-68.
- Harsono. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hessel, Tangkilisan. 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward. Yogyakarta : Lukman Ofset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). Kamus besar bahasa Indonesia.

- Inu Kencana Syafiie, M.Si, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Jetten, V., Govers, G., & Hessel, R. (2003). Erosion models: quality of spatial predictions. *Hydrological processes*, 17(5), 887-900.
- Jones, Charles O.1991. Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy). :Bandung: Mandar Maju.
- Kodoatie, R. J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa infrastruktur*. Pustaka Pelajar.
- Kurniawati, F. (2018). Implementasi Program Bank Sampah Malang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Penerapan Bank Sampah Malang di Kelurahan Sukun) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Monica, D. S., & Lanin, D. (2004). *Efektivitas Program Inovasi Desa Di Nagari Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman*. I(1).
- Mulyadi, F. A., Vestikowati, E., & Yuliani, D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Tchobanoglous, G., & Kreith, F. (2002). *Handbook of solid waste management*. McGraw-Hill Education.
- Rosmita, R. C. (2022). Ekologis Di Tengah Pandemi Covid-19: Pencemaran Lingkungan Sebagai Suatu Masalah Ekologis Di Masa Pandemi Covid-19. *Diegesis: Jurnal Teologi*, 7(2), 114-128.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 71-84.
- Suriyani, E., & Redhani, M. E. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kelurahan antasan besar kecamatan banjarmasin tengah kota banjarmasin. *Al-ulum: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1).
- Setiawan, A. H. (2004). Peningkatan Partisipasi Anggota Dalam Rangka Menunjang Pengembangan Usaha Koperasi. *Jurnal Dinamika*

- Pembangunan (JDP)*, 1(Nomor 1), 39-43.
- Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Grasindo. *Jakarta, 2002, Hal, 70*.
- Pasaribu, H. W., Nasution, I., & Matondang, A. (2021). Analisis Pelayanan Pasien Rawat Jalan Pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Haji Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 168-178.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- SNI, S. N. I. N. 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. *Badan Standar Nasional (BSN)*.
- Ulfaridha, G. (2017). Implementasi Program 3R (*Reduce, Reuse Dan Recycle*) Melalui Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan
- Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Perundang-Undangan dan lainnya**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Keputusan Kepala Desa Pasirlawang Nomor 141.1/SK.13/Ds.07/VI/2022 tentang Pembentukan Bank Sampah.
- Profil Desa Pasirlawang Kecamatan purwadadi Kabupaten Ciamis <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses pada tanggal 11 Juni 2023